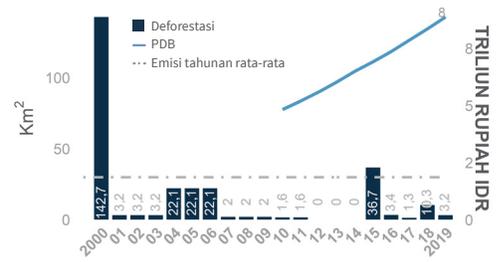


Sumber data:
Sosial-ekonomi: BPS
Area hutan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Kabupaten Gorontalo, & BPKH XV Gorontalo
Emisi tahunan rata-rata: diambil dari data KLHK

SEKILAS TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

- Kabupaten Gorontalo terletak di salah satu dari tiga Provinsi Konservasi di Indonesia dengan total kawasan hutan sekitar 47% dari luas kabupaten (~12% total kawasan hutan di provinsi).
- Kabupaten dengan penduduk terpadat di Provinsi Gorontalo dengan infrastruktur kurang memadai dan sedang dalam tahap perbaikan melalui beberapa proyek konstruksi (mis. Jalan Lingkar Luar Gorontalo, Kanal Tapodu, Perangkap Sedimen di Muar Danau Limboto)
- Danau Limboto, tempat persinggahan utama/rumah bagi 85 spesies burung dan hotspot burung migran, telah diupayakan revitalisasi tetapi luasannya terus berkurang karena sedimentasi dan perubahan penggunaan lahan di dataran
- Suaka Margasatwa Nantu Boliyohuto (SMNB), salah satu hutan utuh terakhir di Sulawesi, terletak di Kabupaten Gorontalo dan dua Kabupaten lainnya yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, spesies endemik dan sesapan (salt-lick) yang penting secara global, namun menghadapi peningkatan tekanan dari transmigran/masyarakat lokal yang memanen hasil hutan kayu maupun non-kayu
- Potensi agrikultur yang besar, dengan kontribusi terhadap PDRB lebih dari 35%, khususnya jagung dan kelapa yang mempunyai peluang pasar.

PENYEBAB DEFORESTASI	<ul style="list-style-type: none"> Ladang berpindah dan penebangan liar skala kecil Kebakaran hutan Perkebunan skala kecil
EMISI TAHUNAN RATA-RATA DARI DEFORESTASI	263.648,55 tCO ₂ (2010-2019) <i>Termasuk biomassa di atas permukaan tanah dan gambut</i>
AREA	2125,47 km ²
POPULASI	380.290 (2020)
HDI	66,92 (2020)
PDB	IDR 8.872.521.510.000 (2019, Tahun dasar 2010)
GINI	0,3968 (2018)
KEGIATAN EKONOMI UTAMA	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian dan Perkebunan Kehutanan dan Perikanan Konstruksi Perdagangan
POPULASI DESA/KOTA	69,21%/30,78%
KOMODITAS STRATEGIS (PRODUKTIVITAS KABUPATEN, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> Padi (5,4 ton) Jagung (4,7 ton) Kelapa (1,02 ton)



SOROTAN INOVASI

Program Perubahan Iklim di Gorontalo telah diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dengan alokasi dana sebesar ~10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD; 188 juta rupiah di tahun 2020). Guna memastikan implementasi yang tepat dan integrasi perencanaan pembangunan lebih lanjut dari rencana dan strategi yang telah dibuat, **Kelompok Kerja Perubahan Iklim (Pokja PI)** multipihak dibentuk di tahun 2016 dan diperkuat melalui Keputusan Bupati. Sejak itu, fungsi Pokja PI telah diperluas untuk mencakup implementasi program Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), mengumpulkan data emisi dan serapan Gas Rumah Kaca (GRK) termasuk stok karbon.

Mengingat komitmennya terhadap perubahan iklim, keanggotaannya dalam Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), namun mempunyai data emisi GRK yang terbatas, Gorontalo dipilih sebagai percontohan tingkat kabupaten untuk menerapkan IGRK -dimana sebelum tahun 2018 ketentuan nasional

menyatakan bahwa IGRK hanya dilaksanakan di tingkat provinsi. Proses IGRK tingkat kabupaten bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih akurat melalui kontak langsung dengan sektor penghasil GRK. Pada tahun 2019, Kabupaten Gorontalo Bersama KLHK, Koaksi, dan LTKL mulai merencanakan pelaksanaan IGRK dan menunjuk Pokja PI untuk tugas tersebut karena dibutuhkan koordinator kelembagaan yang efektif dan efisien untuk mendukung proses lintas sektoral, koordinasi antar pihak, pengumpulan data, pembangunan kapasitas dan pengalangan dana. Penugasan Pokja PI ini merupakan pendekatan IGRK yang berbeda, dimana pemangku kepentingan terkait dilibatkan untuk menciptakan proses yang transparan, akurat, dan konsisten mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional. Pada tahun 2020, SK Bupati Kelompok Kerja Perubahan Iklim diperbaharui untuk mendukung perluasan fungsi Pokja PI dengan susunan kelembagaan yang lebih lengkap, pembaharuan anggota (lembaga pemerintah kabupaten dan perwakilan masyarakat), penambahan agenda prioritas dalam program mitigasi, dan kebutuhan evaluasi untuk program adaptasi.

LINI MASA PERISTIWA PENTING

<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Gorontalo didirikan di bawah administrasi Provinsi Sulawesi Utara 	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten dan Kota Gorontalo dipisahkan dari Provinsi mayoritas Kristen di Sulawesi Utara untuk membentuk Provinsi Gorontalo setelah jatuhnya Soeharto, mengakui perbedaan budaya dan agama 	<ul style="list-style-type: none"> Bupati Gorontalo terpilih menjadi Ketua Kopek (Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa) Peraturan Provinsi untuk Rencana Tata Ruang Danau Limboto disahkan 	<ul style="list-style-type: none"> Gorontalo menjadi anggota LTKL dan memulai implementasi IGRK; Bupati Gorontalo terpilih sebagai Koordinator Bidang Pengembangan Bisnis dan Investasi di LTKL Pemerintah Provinsi dan Mitra menyelenggarakan Gorontalo Development Forum 2019 – platform dialog SDGs kolaboratif dan partisipatif Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dimulai untuk melestarikan/memulihkan produktivitas lahan dan daya dukung lingkungan Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) untuk memantau kemajuan menuju SDGs diinisiasi 	<ul style="list-style-type: none"> SK Bupati Pokja PI mengalami perbaharuan untuk mengakomodasi mandat tambahan Proses Penyusunan Keputusan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Limboto (sebagai Kawasan Strategis Nasional)
---	---	--	--	--

JANJI & KOMITMEN

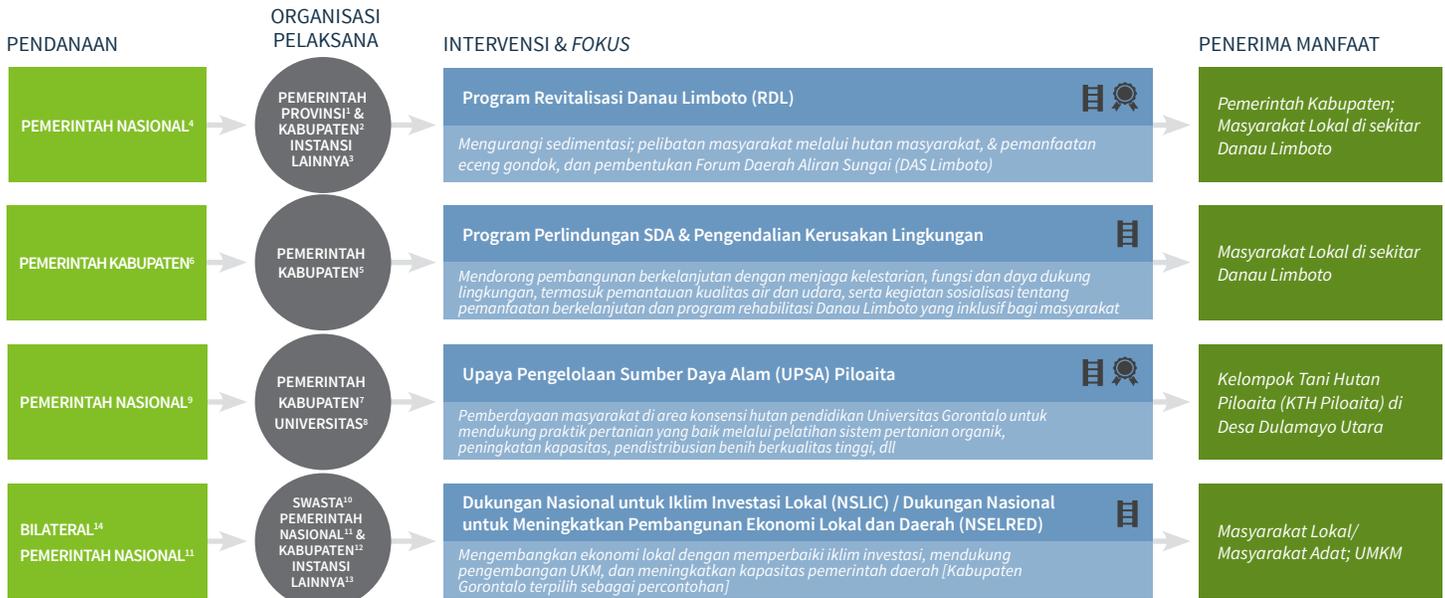
1 Komitmen kabupaten untuk menemukan equilibrium antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui beberapa target mis: meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan partisipasi wanita di angkatan kerja sebesar 1-2%; penghitungan IKLH dan mempertahankan skor >60; meningkatkan jumlah sampah dikelola sebesar 10%; penghitungan Indeks Good Governance dan mempertahankan skor >4,86; relatif terhadap nilai di tahun 2015. 2 Memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), termasuk meningkatkan Indeks Kualitas & Tata Kelola Lingkungan, dan mengupayakan kesejahteraan petani. 3 Komitmen Provinsi (termasuk Kabupaten/Kota) untuk mendukung SDGs; misalnya, mengurangi tingkat kemiskinan 3%, memberantas malaria, meningkatkan akses air bersih 13%, menurunkan angka pengangguran 2%, mempertahankan total tutupan hutan 63%, dan meningkatkan rehabilitasi lahan kritis 5,5%, relatif terhadap nilai di tahun 2016. 4 Kontribusi terhadap target nasional: penurunan emisi sebesar 29% (dengan upaya sendiri) sampai dengan 41% (jika mendapat dukungan internasional) di bawah tingkat BAU sebesar 2,869 Mton CO₂.



◆ Bagian dari perjanjian internasional

INTERVENSI KUNCI

✕ DISINSENTIF 📅 LANGKAH-LANGKAH PEMUNGKIN 🏆 INSENTIF



1 Pemerintah Provinsi Gorontalo. 2 Pemerintah Kabupaten Gorontalo. 3 Forum DAS Limboto. 4 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5 Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo. 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7 Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo. 8 Universitas Gorontalo. 9 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 10 CowaterSogema International Inc. 11 Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 12 Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gorontalo. 13 Tim Pengarah Proyek, Tim Teknis Proyek, Tim Koordinasi Provinsi, Tim Pemangku Kepentingan Lokal. 14 Global Affairs Canada.

KEMAJUAN MENUJU KEBERLANJUTAN YURISDIKSIONAL

🟡 AWAL 🟢 MENENGAH 🟣 LANJUT

Strategi Pembangunan Berkelanjutan Terintegrasi	🟡	<ul style="list-style-type: none"> RPJMD Kabupaten memiliki target dan rencana aksi untuk pembangunan berkelanjutan, terintegrasi dengan KLHS & RPPLH dan sejalan dengan Rencana Jangka Menengah & Panjang Provinsi & Nasional Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG 2016-2020) adalah pedoman bagi semua instansi kabupaten untuk menyusun program & anggaran guna mengatasi isu-isu terkait gender di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dll
Rencana Tata Ruang	🟡	<ul style="list-style-type: none"> RTRW Kabupaten (rencana tata ruang) terintegrasi dengan KLHS dan RTRW Provinsi; penyelarasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan RTRW Nasional & Kabupaten berdasarkan dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) Platform Satu Peta sedang dikembangkan dan disosialisasikan
Target Kinerja	🟡	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat banyak target (e.g., kemiskinan, peningkatan kemudahan berusaha (EoDB), rehabilitasi lingkungan), tetapi tidak untuk PDRB Hijau dan mengurangi kesenjangan antara tenaga kerja pertanian & upah minimum Pengembangan komoditas strategis mencakup target produksi & sertifikasi industri berkelanjutan, tetapi tidak ada target untuk pengelolaan lahan atau sertifikasi petani kecil
Pemantauan, Pelaporan & Verifikasi (MRV)	🟢	<ul style="list-style-type: none"> KDSD, sebuah sistem pemantauan terintegrasi & IGRK sedang dalam proses; kemajuan dalam pasokan air bersih, pendidikan, & data infrastruktur kesehatan dilaporkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mitra Kehutanan Masyarakat (CFP; Relawan masyarakat lokal/adat) membantu Polisi Hutan (Polhut) memantau kawasan hutan & KPH Provinsi melaksanakan MRV & pemetaan hutan bersama Pemerintah Kabupaten & masyarakat lokal/adat Kabupaten pertama di provinsi yang menerapkan pemantauan & pelaporan penyerapan anggaran melalui platform tingkat provinsi (e-monev+); laporan penandaan dan pemantauan APBD untuk belanja terkait program API sudah dipublikasikan.
Kebijakan & Insentif	🟡	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan/keputusan (e.g., Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); Satgas Reforma Agraria (STRA); Moratorium Kelapa Sawit) & inisiatif (misalnya, larangan penanaman lereng, RDL, RHL) menunjukkan upaya keberlanjutan Pemerintah Kabupaten bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kemitraan sektor swasta (e.g. menyewa pabrik milik pemerintah) & memfasilitasi proses perizinan bisnis berkelanjutan
Tata Kelola Multi-Pemangku Kepentingan	🟡	<ul style="list-style-type: none"> Dialog pengembangan komoditas strategis & implementasi KDSD mencakup pemerintah, masyarakat lokal/adat, akademisi & LSM Berbagai kelompok multi-pemangku kepentingan kabupaten, (e.g, Pokja PI, STRA) melibatkan masyarakat lokal/adat & akademisi; tim proyek BalitBangda (Badan Penelitian & Pengembangan Daerah) termasuk peneliti & ahli sebagai penasihat
Pertanian Berkelanjutan	🟡	<ul style="list-style-type: none"> Komoditas strategis (khususnya jagung & kelapa) memiliki distribusi, produksi, & data spasial sebagian tersedia melalui RTRW, LP2B & BPS; namun data izin lokasi kurang & peta sebaran tidak terbuka untuk publik Berbagai organisasi petani ada di kabupaten (e.g., HKTI - bahan mentah untuk pertanian, perikanan, kehutanan; KOPEK - kelapa, OSAKA - industri mikro pengolahan kelapa)
Hak Masyarakat Adat & Masyarakat Lokal	🟡	<ul style="list-style-type: none"> Musrenbang kabupaten, forum partisipatif yang bertujuan untuk mendiskusikan isu di masyarakat dan menentukan perencanaan jangka pendek, melibatkan perempuan, forum masyarakat, mitra pembangunan, & sektor swasta Uduluwo To Ulimo Lo, lembaga hukum masyarakat adat, memberi pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten pada konflik kepentingan Pemerintah Kabupaten mendorong Masyarakat Adat dan kelompok rentan lainnya melalui pelatihan bisnis & usaha kolaboratif, & mengembangkan model kelembagaan untuk perlindungan & pelayanan sosial.
Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan	🟢	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar inisiatif berkelanjutan didanai melalui APBD; dukungan finansial untuk program pertanian & bantuan sosial dari pemerintah kabupaten & nasional Kabupaten Gorontalo sedang mengajukan Green Climate Fund dalam pengembangan pertanian terintegrasi & reduksi emisi GRK.

SITASI | I. Dunggio, R. Jaya, H. Malik, S. Hidayat, C. H. Tomahayu, L. Gobel, G. Kojongkam, M. Amiruddin, P.R. Pasaribu, R.P. Istanti, S. Peteru. 2021. "Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Indonesia" dalam C. Stickler et al. (Ed.), *Keadaan Keberlanjutan Yurisdiksional*. San Francisco, CA: EII; Bogor, Indonesia: CIFOR.

REFERENSI DAN SUMBER DATA YANG LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability 2021/06/28

TIM TEKNIS



DIDUKUNG OLEH



based on a decision of the German Bundestag

TANTANGAN & PELUANG

- TANTANGAN**
- Kurangnya antusiasme dan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian
 - Sumber Daya Manusia dan Pendidikan yang terbatas, khususnya dalam manajemen UMKM dan R&D Kabupaten
 - Kesulitan dalam mengakses modal dan koneksi ke sektor perusahaan/swasta, terutama dalam memenuhi persyaratan & birokrasi serta pengetahuan pertanian yang tidak memadai membatasi produktivitas petani dan membutuhkan intervensi
 - Tumpang tindih kewenangan antar instansi kabupaten mengakibatkan proses birokrasi yang panjang

- PELUANG**
- Pemerintah provinsi dan kabupaten sangat mendukung pertanian berkelanjutan (e.g. UMKM minyak kelapa murni), program prioritas (e.g. UPSA) dengan peraturan pendukung (e.g. LP2B) telah tersedia
 - SMNB dapat menjadi taman nasional jika KLHK menyetujui, yang dapat melindungi hutan dan keanekaragaman hayati, dengan potensi pariwisata
 - Adanya CFP sebagai mitra pemerintah kabupaten dalam melestarikan lingkungan dan hutan
 - Potensi untuk pengembangan ekowisata dan agrowisata namun membutuhkan kesepakatan dan perencanaan di antara pemangku kepentingan terkait